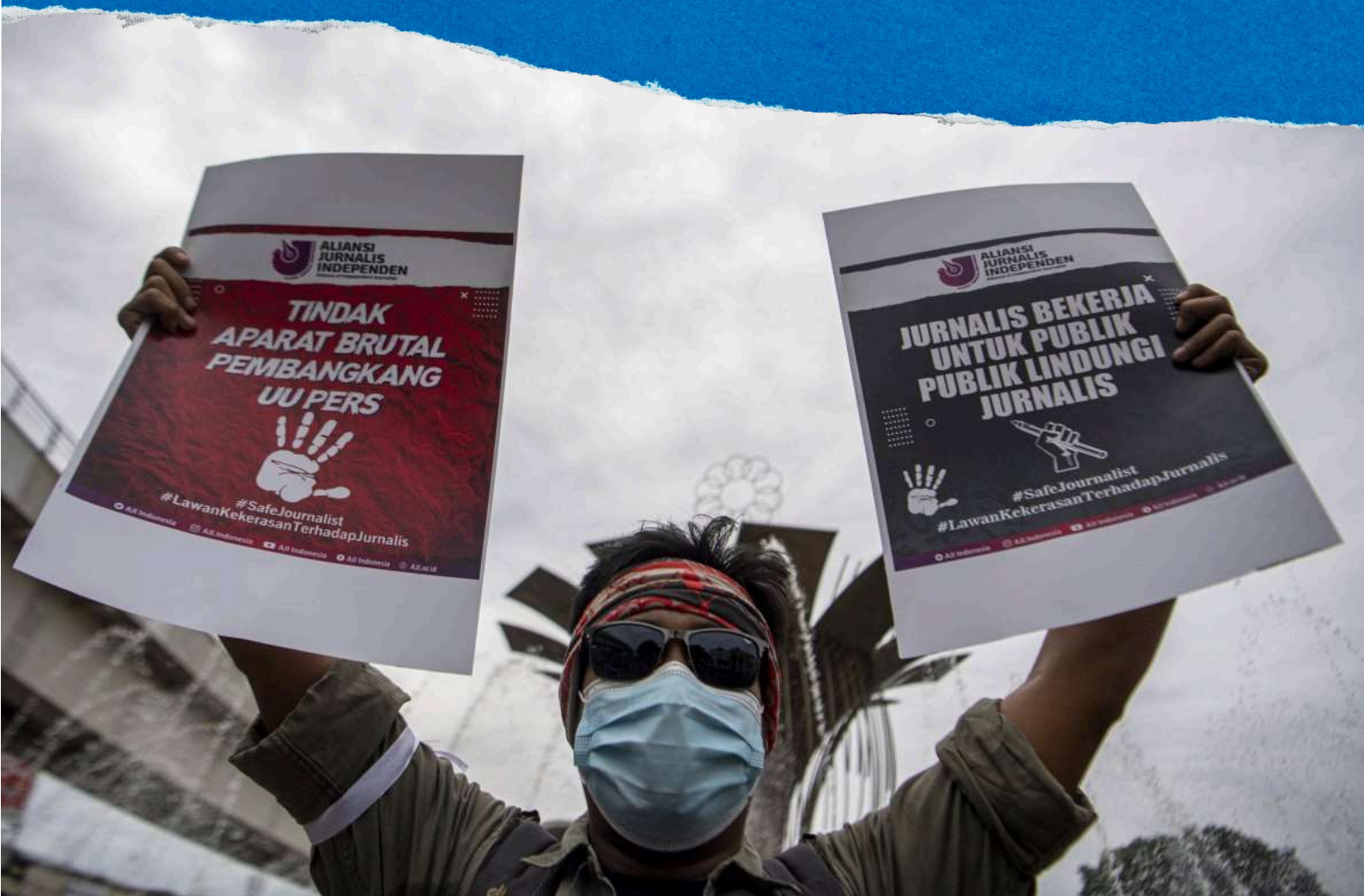


DEWANPERS



PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 adalah 70,12 turun sebesar -1,45 poin dibandingkan IKP Tahun 2023

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dewan Pers mengukur 3 variabel lingkungan dan 20 indikator yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik mengukur 9 indikator, Lingkungan Ekonomi mengukur 5 indikator, dan Lingkungan Hukum mengukur 6 indikator. Survei dilaksanakan Bulan Mei – September 2024 di seluruh 38 provinsi di Indonesia dengan telah melibatkan 407 orang informan ahli, yang terdiri dari 394 informan ahli dari 38 provinsi dan 14 informan ahli tingkat nasional (*National Assessment Council/NAC*).

Nilai IKP Tahun 2024 adalah sebesar 70,12 dan masuk ke dalam kategori “Cukup Bebas”. Nilai ini turun -1,45 poin dibandingkan nilai IKP pada Tahun 2023. Skor di setiap lingkungan berada dalam kisaran angka yang sama, yaitu di sekitar 70-an, yang menunjukkan bahwa kondisi kemerdekaan pers nasional berada dalam kategori “Cukup Bebas” dan ini terjadi di semua lingkungan, walaupun Lingkungan Ekonomi skornya paling rendah. Lingkungan Fisik & Politik memiliki angka lebih tinggi, yaitu 70,82, Lingkungan Hukum memiliki angka 69,98, sedangkan Lingkungan Ekonomi memiliki angka paling rendah, yaitu 68,74.

Perhitungan IKP Nasional didapat dari nilai IKP Provinsi (rata-rata nilai IKP dari 38 provinsi) dengan bobot 70%, ditambah dengan nilai IKP NAC (*National Assessment Council*) dengan bobot 30%. Hasil IKP Provinsi masih lebih tinggi dibanding IKP NAC, yaitu 71,64 berbanding 66,57, dan itulah yang menyebabkan nilai IKP Nasional jadi sedikit lebih rendah dibanding IKP Provinsi.

Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022 terjadi kenaikan IKP Nasional berturut-turut namun setelahnya, yaitu sejak Tahun 2022 terjadi penurunan sampai dengan Tahun 2024 ini. Penurunan terbesar sepanjang 6 tahun terakhir pelaksanaan Survei IKP adalah terjadi di Tahun 2023, dimana secara nasional nilai IKP turun sebanyak -6,31 poin, dan di semua variabel lingkungan besaran penurunan juga ada di sekitar -6 poin. Pada Tahun 2024 ini nilai IKP turun lagi namun tidak sebesar penurunan yang terjadi di tahun lalu, yaitu turun hanya sebesar -1.45 poin di tahun ini.

Terkait dukungan terhadap Dewan Pers dalam upaya meningkatkan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia, Ibu Yunes dan Prof. Adrianus Meliala menyampaikan hal yang senada, yaitu adanya kemungkinan Dewan Pers dapat memanfaatkan bantuan Democracy Trust Fund yang sedang digagas oleh Bappenas dan menggulirkan kemungkinan dukungan pemerintah lainnya dalam bentuk dana abadi atau Endowment Fund.



Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi di Indonesia, dengan nilai 80,91, dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berkategori "Bebas".

Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan Nilai IKP tertinggi di Indonesia dengan nilai IKP sebesar 80,91. Hasil ini sekaligus juga mengukuhkan Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2024 menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan nilai lebih dari 80 dan memperoleh kategori "Bebas", sementara 37 provinsi lainnya hanya memperoleh kategori di bawahnya, yaitu "Cukup Bebas". Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai IKP yang tinggi karena adanya peningkatan signifikan dari Kondisi Lingkungan Fisik Politik (+2,90), sedangkan Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Hukum mengalami penurunan -1,12 dan -1,59 poin. Indikator Pendidikan Insan pers merupakan indikator yang dinilai paling tinggi di Kalimantan Selatan. Selain itu, yang diduga membuat Kalimantan Selatan memiliki nilai yang tinggi dan agak berbeda dengan provinsi lainnya adalah adanya suatu perkumpulan pimpinan organisasi pers yang bernama Konsorsium Pers Banua yang bermaksud untuk meningkatkan kode etik jurnalistik para anggotanya dan meningkatkan marwah dan kemerdekaan pers di daerah.

Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun sebelumnya menjadi provinsi dengan nilai IKP tertinggi, tahun ini hanya menempati urutan kedua dengan Nilai 79,96 dan memperoleh kategori "Cukup Bebas". Provinsi lainnya yang juga relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah (79,58), Provinsi Bali (79,42) dan Provinsi DI Yogyakarta (77,71). Sementara itu, provinsi yang mendapatkan Nilai IKP paling rendah berturut-turut adalah: Papua Tengah (61,34), Lampung (62,04), Papua (65,60), Maluku (65,61), dan Sumatera Barat (66,61).

Tiga provinsi teratas, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dalam 4 atau 5 tahun terakhir mendapatkan nilai IKP yang tinggi di sekitar 80an. Misalnya Kalimantan Selatan, dalam 4 tahun terakhir selalu berada di peringkat 10 besar nilai IKP secara nasional kecuali di Tahun 2022 hanya di peringkat ke-21. Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dalam 4 tahun terakhir selalu berada juga di 10 besar nilai IKP secara nasional.

Sebaliknya provinsi dengan peringkat terbawah, yaitu Papua Tengah, Lampung, Papua, dan Maluku dalam 6 tahun ke belakang selalu merupakan provinsi yang berada di luar 15 besar IKP secara nasional, kecuali untuk Papua Tengah yang baru diukur Tahun 2024 ini karena merupakan provinsi baru hasil pemekaran.

Hasil IKP yang cenderung tinggi di Pulau Kalimantan memang ditunjukkan oleh banyaknya provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki nilai yang tinggi. Tahun 2024 saja tiga besar provinsi dengan nilai IKP tertinggi ada di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara pun masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan nilai IKP tertinggi di Indonesia di Tahun 2024.